****

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI BAGI PENGHASIL LIMBAH ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KETENTUAN TERKAIT KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK (*E-WASTE*) DI KOTA SURABAYA**

Henny Puspita Damayanti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[hennydamayanti16040704137@mhs.unesa.ac.id](mailto:hennydamayanti16040704137@mhs.unesa.ac.id)

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[hezrontinambunan@unesa.ac.id](mailto:hezrontinambunan@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik.

**Kata Kunci**: Penegakan Hukum,Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah.

**Abstract**

Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste regulates the obligation to carry out electronic waste management for producers and processors of electronic waste. This provision is expected to solve the problem of violating provisions related to the obligation to carry out electronic waste management for electronic waste producers in the City of Surabaya. The purpose of this study was to determine the administrative law enforcement and the obstacles faced by the Surabaya City Environmental Agency in enforcing administrative law for electronic waste producers who violate the provisions related to the obligation to carry out electronic waste management in Surabaya City. This research is a sociological juridical research. The research location was conducted at the Surabaya City Environmental Service. The informant in this research is the Head of the Surabaya City Environmental Service. By conducting interviews and documentation and then analyzed descriptively qualitatively. This discussion concludes that the administrative law enforcement carried out by the Surabaya City Environmental Agency has been running properly. In 2018-2019 there was an increase of 16% in supervised business activities. 46 business activities are subject to administrative sanctions which are carried out in stages from written warnings to license suspension. The constraints faced are the supervisors of the Surabaya City Environmental Service who experience limited numbers. Besides, in handling, there are inadequate facilities and facilities because the city of Surabaya does not have its B3 waste management facility. As well as a lack of compliance with the law from the community, in this case, the producer of waste to comply with the provisions related to the obligation to carry out electronic waste management.

**Keywords**: Law Enforcement, Electronic Waste, Electronic Waste.

# **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi saat ini teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat barang elektronik saat ini sangat mudah didapat. Masa penggunaan barang elektronik sendiri memiliki kurun waktu yang relatif singkat (Kang and Schoenung 2005). Barang-barang elektronik biasanya tidak digunakan lagi meskipun masih dapat beroperasi untuk kemudian digantikan dengan yang baru karena masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen menginginkan fitur-fitur baru atau yang lama tidak memadai untuk layanan terbaru dari operator, atau hanya karena ingin berganti saja sehingga barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai ini akhirnya menjadi Limbah Elektronik (e-waste) (Osibanjo, Oladele dan Nnorom 2006). Limbah Elektronik (e-waste) merupakan sampah atau limbah yang berasal dari peralatan elektronik (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018).

Barang-barang elektronik yang nantinya menjadi limbah elektronik ini memiliki komponen-komponen yang berbahaya bagi lingkungan (Bernstad, la Cour Jansen, and Aspegren 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada bagian lampiran menjelaskan bahwa kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 ini juga terdapat pada peralatan elektronik. Pada lampiran tersebut terdapat daftar limbah B3 dari berbagai jenis sumber salah satu diantaranya terdapat limbah B3 yang bersumber dari peralatan elektronik dengan kode limbah B107d. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup manusia, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (Wahyono 2012).

Surabaya sebagai salah satu Kota Metropolitan dan merupakan kota terbesar serta memiliki kepadatan penduduk kedua setelah Jakarta. Selain dikenal dengan kepadatan penduduk tersebut, Kota Surabaya juga merupakan salah satu Kota yang banyak memiliki Industri Elektronik besar seperti Pergudangan Maspion, Pergudangan Margomulyo, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang berlokasi di daerah Rungkut dan lain sebagainya yang dimana perusahaan industri elektronik tersebut banyak memproduksi barang-barang elektronik. Setiap tahunnya perusahaan elektronik tersebut akan memproduksi dan memperbarui barang-barang elektronik dengan yang lebih canggih agar bisa dinikmati oleh pengguna barang-barang elektronik tersebut.

Kota Surabaya khususnya bagian utara, bagian barat, dan bagian timur pada tahun 2019 terdapat potensi timbulan limbah elektronik, tercatat pada bagian Surabaya utara jumlah potensi timbulan limbah elektronik yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 2.421 ton/tahun (Jayanti and Mirwan 2018). Pada Surabaya bagian barat jumlah potensi timbulan limbah elektronik yang dihasilkan oleh masyarakat yakni sebanyak 1.893 ton/tahun (Indrihastuti and Pandebesie 2014). Kemudian di Surabaya bagian timur jumlah potensi timbulan limbah elektronik yang dihasilkan oleh masyarakat yakni berjumlah 2.472 ton/tahun (Prans and Pandebesie 2013). Jadi berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan bahwa peningkatan potensi timbulan limbah elektronik terbanyak berada di Surabaya bagian timur yakni sebesar 2.472 ton/tahun. Limbah elektronik tersebut yang dihasilkan oleh masyarakat/penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah elektronik. Dalam hal ini limbah tersebut harus segera ditangani, oleh sebab itu diperlukannya pengelolaan limbah elektronik agar dapat meminimalisir jumlah peningkatan limbah yang terjadi di Kota Surabaya.

Pada pengelolaannya, limbah elektronik tidak boleh bercampur dengan sampah domestik (sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga) dan harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Limbah ini perlu dikelola dengan baik agar tidak berbahaya bagi lingkungan, mengingat limbah elektronik mengandung bahan berbahaya seperti logam berat, PVC, PCB, dan lainnya (Direktorat Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3-KLHK) 2019). Dalam hal ini, penanganan pengelolaan limbah elektronik harus dilaksanakan secara tepat dengan memperhatikan dan menaati prosedur persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai.

Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan limbah elektronik mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Pada peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan limbah elektronik wajib dilaksanakan oleh penghasil limbah elektronik dan apabila penghasil limbah elektronik tidak mampu melakukan pengelolaannya sendiri, maka selanjutnya limbah tersebut harus segera diserahkan kepada pihak ketiga (pengolah limbah elektronik) yang berizin agar pengelolaan limbah elektronik dapat segera ditangani. Dengan dibentuknya peraturan tersebut diharapkan mampu meminimalisir jumlah peningkatan limbah elektronik di Kota Surabaya serta mampu mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil limbah elektronik.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kota Surabaya bahwa dalam penangangan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) terdapat sarana dan fasilitas yang kurang memadai dikarenakan di Kota Surabaya belum memiliki tempat pemilahan atau tempat pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) tersendiri.

“Ibu City Mangezong selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menegaskan bahwa setiap industri memiliki potensi limbah elektronik. Limbah yang termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut belum memiliki tempat pemilahan atau tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Sejauh ini Pemerintah Kota Surabaya hanya berwenang mengeluarkan izin penyimpanan limbah B3 sementara, namun dalam hal ini penghasil limbah elektronik baik Perusahaan/Industrsi maupun kegiatan usaha tidak bisa langsung membuang limbah elektronik yang dihasilkannya ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA) melainkan harus ke pengolah limbah elektronik (pihak ketiga) yang berizin terlebih dahulu.” (Press Reader Jawa Pos 2018).

Penghasil limbah B3 baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut menyerahkan pengelolaan limbahnya ke tempat pengolah limbah yang terdapat di beberapa kota lain (diluar Kota Surabaya) yang sudah memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri.

“Selama ini limbah B3 tersebut di kelola ke daerah Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan di Jawa Timur hanya Kota Mojokerto yang mempunyai tempat pengelolaan limbah B3, itupun dengan kapasitas yang kecil. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibu City Mangezong selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bahwa pengelolaan limbah B3 itu sangat penting, oleh sebab itu limbah berbahaya dan beracun membutuhkan penanganan yang khusus dan tertentu” (Lathifiyah 2019).

Pembangunan tempat pengelolaan limbah B3 di Kota Surabaya dirasa mampu mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 (limbah elektronik) baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha. Pelanggaran yang terjadi disebabkan mahalnya biaya transportasi pengelolaan limbah B3 dari Kota Surabaya ke Kota Mojokerto hingga Jawa Barat dikarenakan jarak yang sangat jauh, biaya pengiriman limbah B3 sangat mahal serta limbahnya harus terpisah sesuai dengan jenisnya sehingga penghasil limbah B3 baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut sering melanggar dan tidak mengelola limbah B3-nya sesuai dengan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan (Lathifiyah 2019).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukannya penegakan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya serta kendala apa saja yang dihadapi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya.

Penegakan hukum administrasi atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik perlu dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, mengingat dalam penanganan pengelolaan limbah elektronik harus dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Maka, diharapkan pemerintah segera mendirikan pembangunan tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri di Kota Surabaya. Hal ini supaya penghasil limbah B3 (limbah elektronik) baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha dapat melaksanakan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) sesuai dengan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan dan diberlakukan, dapat meminimalisir biaya transportasi, serta bisa mendapatkan sarana dan fasilitas yang memadai. Dengan begitu dalam penanganan pengelolaan limbah elektronik dapat berjalan secara efektif serta dapat mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 (limbah elektronik).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (hukum empiris), yaitu penelitian hukum yang memproleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti Fajar and Achmad 2010). Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penegakan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya.

Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) di Kota Surabaya, yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, buku-buku maupun literatur dan jurnal skripsi.

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Teknik Pengumpulan Data melalui wawancara, yang dilaksanakan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan dicatat secara sistematis. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam berkaitan dengan penegakan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik. Kemudian dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yaitu dokumen mengenai data jumlah peningkatan limbah elektronik setiap tahunnya serta dokumen mengenai penindakan yang telah diterapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terhadap penghasil limbah yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data dianalisa secara deskriptif kualitatif yang dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk dapat memberikan gambaran atau penjelasan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Mukti Fajar and Achmad 2010). Data yang diperoleh kemudian dirujukkan aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait penegakan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap kegiatan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya.

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, yang kemudian dideskripsikan dan menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data yang diperoleh dari masing-masing informan akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya atau yang dikenal dengan DLH Kota Surabaya merupakan lembaga dengan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengendalian dan pengawasan lingkungan, penanggulangan dampak lingkungan dan pemulihan dampak lingkungan. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan pilar dalam mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Wilayah/Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berlokasi di Jalan Jimerto No. 25-27 Lt. IV Surabaya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan limbah elektronik dikarenakan limbah elektronik dikategorikan sebagai limbah B3. Pada Peraturan Pemerintah tersebut terdapat Pasal 99 yang dimana mewajibkan melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) bagi penghasil limbah B3 (limbah elektronik) atau pengolah limbah B3 (pihak ketiga). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 99 ayat (2) yang mengatur bahwa bagi penghasil limbah B3 (limbah elektronik) yang tidak mampu melakukannya sendiri, maka tindakan selanjutnya yakni dengan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga (pengolah limbah B3).

Pengolah limbah B3 dalam penjelasannya terdapat pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang menyatakan bahwa “*Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3*”. Jadi Pengolah limbah B3 (limbah elektronik) yang dimaksud dalam hal ini yakni pihak ketiga yang diberikan wewenang serta mendapat izin dari pemerintah baik izin lingkungan maupun izin operasional untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) yang dimana limbah tersebut berasal dari penghasil limbah B3 baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 (limbah elektronik), yang tidak mampu melakukan kegiatan pengelolaan limbahnya sendiri. Hal ini juga berdasar pada Pasal 125 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang berbunyi

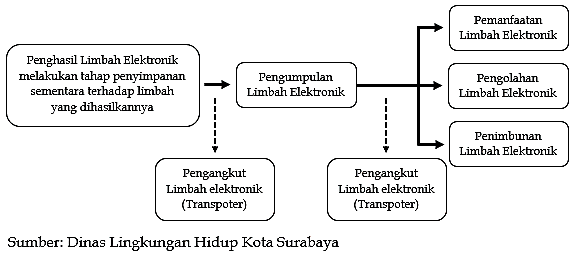
“Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib memiliki:

1. Izin Lingkungan; dan
2. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.”

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana dalam hal ini dapat mengurangi jumlah limbah elektronik yang berada di lingkungan sekitar agar tidak terjadi timbulan limbah elektronik yang semakin meningkat serta tidak menjadi dampak yang tidak baik atau ancaman baru bagi kehidupan manusia dimasa mendatang, mengingat limbah elektronik yang mengandung unsur B3 yang apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan manusia, hal ini ditegaskan oleh Bapak Harijadi selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang Pengawasan dan Pengendalian. Selanjutnya, Beliau juga menyampaikan mengenai tahapan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) yang dimana proses pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak pengolah limbah elektronik (pihak ketiga) yang akan dijabarkan pada bagan 3.1 berikut ini:

**Bagan 1.1**

**Tahapan Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Limbah Elektronik)**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Sumber: Dikelola Sendiri

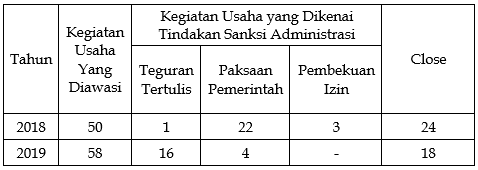
Berdasarkan bagan di atas, untuk dapat melaksanakan tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) yang meliputi penyimpanan sementara limbah elektronik, pengumpulan limbah elektronik, pengangkutan limbah elektronik, pemanfaatan limbah elektronik, pengolahan limbah elektronik, penimbunan limbah elektronik, terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakannya, yakni disetiap masing-masing tahapan wajib memiliki izin terlebih dahulu. Dalam penjelasannya proses pengangkutan limbah B3 (limbah elektronik) merupakan kegiatan pemindahan lokasi limbah dari lokasi kegiatan penghasil limbah ke lokasi (penyimpanan atau pengumpul atau pengolahan atau pemanfaatan limbah) diluar lokasi penghasil limbah, serta pemindahan ke lokasi penimbunan hasil pengolahan. Setiap ada pemindahtanganan ataupun pemindah lokasi limbah antar pihak atau antar lokasi harus disertai dengan dokumen limbah B3 (*manifest)* yang diberikan pada waktu penyerahan limbah (Tanuwidjaja 2018).

Dokumen limbah B3 (manifest) terdiri dari 3 bagian, yaitu: (Tanuwidjaja 2018)a) Bagian I : Harus diisi oleh penghasil/pengumpul, b) Bagian II : Harus diisi oleh pengangkut, c) Bagian III : Harus diisi oleh pengumpul/pemanfaat/pengolah. Sebelum melaksanakan kegiatan pengangkutan ini terdapat hal yang wajib dimiliki oleh pengangkut limbah B3 (transpoter) terlebih dahulu yakni wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 (limbah elektronik) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan wajib mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 (limbah elektronik) kepada Kementerian Perhubungan (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2018). Hal ini berdasar pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, terdapat pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilakukan oleh perusahaan/industri maupun kegiatan usaha dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3, berikut data yang tertera pada tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Penindakan Sanksi Administrasi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya**



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sejak tahun 2018 hingga 2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi dengan mekanisme pelaksanaan secara bertahap dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga pembekuan izin. Dari jumlah kegiatan usaha yang dikenai sanksi administrasi tersebut, hanya 4 kegiatan usaha belum memenuhi sanksi administrasi sebagaimana diterima. Apabila dari jangka waktu yang diberikan belum memenuhi sanksi administrasi, maka akan diberi sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya.

Pada tabel di atas tertera kata *close*, yang dimaksud dengan *close* yakni kegiatan usaha (pelanggar) yang dimana kegiatan usaha tersebut sudah memperbaiki dan memenuhi sanksi administrasi yang telah diberikan. Bapak Harijadi selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang Pengawasan dan Pengendalian menyampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik), seringkali pada saat pemeriksaan oleh pihak pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menemukan kegiatan usaha yang belum memiliki izin tempat penyimpanan sementara. Pada saat pemeriksaan ditemukan juga bahwa limbah yang dihasilkan perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut belum terdata pada dokumen-dokumen persyaratannya.

Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kota Surabaya atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha di kota Surabaya tersebut dilakukan melalui upaya represif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harijadi selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang Pengawasan dan Pengendalian, menjelaskan bahwa dalam hal penegakan hukum administrasi secara represif yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah dengan memberikan penindakan berupa sanksi administrasi meliputi sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik), pencabutan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik). Dengan mekanisme penerapan sanksi administrasi yang dilaksanakan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu dilaksanakan secara bertahap.

Penegakan hukum administrasi secara represif dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bertujuan untuk dapat memberikan penindakan serta peringatan kepada penghasil limbah elektronik yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan agar bagi penghasil limbah elektronik dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan tetap memperhatikan prosedur persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

**Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang** **Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Limbah Elektronik (*E-Waste*) Di Kota Surabaya**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku aparatur dalam penegakan hukum lingkungan sebagai pejabat/instansi yang berwenang memberikan izin wajib mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil limbah elektronik dalam melaksanakan ketentuan mengenai kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik, serta sanksi yang diberikan dapat memberikan peringatan kepada pelanggar supaya dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan tetap memperhatikan prosedur persyaratan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik). Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terdapat salah satu bidang yakni Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Pada bidang ini bertugas melakukan pengawasan pada kegiatan usaha yang mendirikan usahanya di lingkup wilayah Kota Surabaya. Kegiatan usaha tersebut meliputi Rumah Sakit, Industri, dan Kegiatan Dosmestik, kegatan domestik yang dimaksud yakni Hotel, Apartemen, Pusat Perbelanjaan, dan Perkantoran.

Pengawasan yang dilaksanakan tim pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yakni terdapat Pengawasan Rutin, Pengawasan Melalui Pelaporan (Pengawasan Tidak Langsung), dan Pengawasan Karena Adanya Pengaduan. Menurut Bapak Harijadi selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang Pengawasan dan Pengendalian menjelaskan bahwa Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan turun langsung ke lapangan dalam artian melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang akan melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) yang dihasilkannya. Dalam hal ini pihak pengawas akan melakukan pemeriksaan berupa pengecekan jumlah potensi limbah yang terdapat pada kegiatan usaha tersebut, selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen baik dokumen perizinan lingkungan maupun dokumen-dokumen lainnya untuk persyaratan melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik). Namun, pengawasan rutin ke lapangan ini tidak bisa dilaksanakan secara rutin dikarenakan banyak kegiatan usaha yang harus dikunjungi/diawasi sedangkan pengawas dalam pelaksanaan pengawasan rutin tersebut dilaksanakan oleh 1 pengawas. Dalam hal ini tidak dapat diprediksi waktu pelaksanaan dilakukannya pengawasan rutin, seperti contoh hari ini dilakukan pengawasan kelapangan pada kegiatan usaha A, selanjutnya untuk melaksanakan pengawasan kembali biasanya dilaksanakan sekitar 5-6 tahun lagi pada kegiatan usaha A tersebut.

Pengawasan melalui pelaporan (pengawasan secara tidak langsung) yakni dimana penghasil limbah B3 (limbah elektronik) baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut yang akan melaporkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait permasalahan pengajuan perizinan limbah B3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan rutin yang dilaksanakan tidak bisa dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, terdapatnya pengawasan melalui pelaporan (pengawasan tidak langsung) dilaksanakan guna memantau kegiatan usaha yang sudah mengajukan pelaporan tersebut dengan proses pelaksanaannya dilaksanakan selama 3 bulan hingga 6 bulan. Selain itu, terdapat juga pengawasan karena adanya pengaduan, selanjutnya pangawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya segera ke lapangan guna mengecek terkait pengaduan yang ada dilakukan oleh satu pengawas.

Persyaratan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada Peraturan Pemerintah tersebut juga terdapat Pasal 99 yang dimana mewajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) yang dihasilkannya. Ketentuan ini ditujukan kepada penghasil limbah B3 (limbah elektronik) atau pengolah limbah (pihak ketiga) yang dimana limbahnya diperoleh dari penghasil limbah B3 (limbah elektronik) yang tidak mampu mengelola limbah yang dihasilkannya sendiri. Dalam hal ini, kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara tepat dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat limbah elektronik dikategorikan sebagai limbah B3 yang apabila dalam persyaratan dan pengelolaannya tidak dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan berlaku maka akan berdampak bagi lingkungan sekitar dan dapat mengganggu kesehatan manusia.

Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran (Amiq 2013).

Aparatur penegakan hukum lingkungan pada umumnya dikategorikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat hukum, Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin (Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup) (Rangkuti 2005). Maupun pihak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat, Pengusaha, dan Pers (Syaprillah 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harijadi selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang Pengawasan dan Pengendalian bahwa penindakan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya atas kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya yaitu dilakukan melalui upaya represif. Penegakan hukum administrasi secara represif dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu dengan memberikan penindakan kepada penghasil limbah elektronik yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik yakni dengan memberikan penindakan pengenaan sanksi administrasi meliputi sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik), pencabutan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik). Mekanisme penerapan sanksi administrasi yang dilaksanakan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan Lampiran I mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin (Thahira 2020).

Bagi penghasil limbah elektronik yang telah melanggar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) tersebut tidak langsung dikenai penindakan sanksi teguran tertulis, sebab terdapat tahap yang harus dipenuhi sebelum dikenai penindakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak pengawasan jika ditemukan adanya pelanggaran yakni dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah dilanggar oleh penghasil limbah tersebut sampai jangka waktu yang diberikan yakni 3 bulan (jangka waktu tergantung dengan temuan/pelanggarannya). Jika belum melakukan perbaikan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya yakni memberikan penindakan berupa sanksi teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada penghasil limbah elektronik. Setelah dikenai sanksi teguran tertulis, maka selanjutnya penghasil limbah elektronik tersebut wajib segera menindaklanjuti teguran tertulis hingga batasan waktu yang telah diberikan. Dalam hal ini jika penghasil limbah elektronik tersebut tidak segera menindaklanjuti sanksi teguran tertulis melebihi batas waktu yang telah diberikan, maka selanjutnya akan dikenai sanksi paksaan pemerintah.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi paksaan pemerintah yakni dengan melakukan penyegelan tempat terhadap kegiatan usaha yang tidak segera menindaklanjuti sanksi administrasi teguran tertulis hingga melebihi batasan waktu yang diberikan. Penyegelan dilakukan sampai kegiatan usaha tersebut telah memenuhi dan mematuhi sanksi administrasi, jika semua sudah terpenuhi maka sanksi administrasi tersebut segera dicabut. Namun, apabila penghasil limbah elektronik tidak mematuhi paksaan pemerintah maka proses selanjutnya yakni akan diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik). Dalam hal ini jika penghasil limbah elektronik tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik) maka proses selanjutnya yakni akan diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik).

Berdasarkan Lampiran I mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai pemberi sanksi yang dalam hal ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup terdapat hal yang wajib dilakukan pada saat menerapkan sanksi administrasi tersebut, yaitu: Pemberi sanksi antara lain wajib: a) menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi. b) memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan. c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi. d) membuat laporan hasil penerapan sanksi.

Upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum administrasi atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik mempunyai tujuan sebagai upaya pencegahan dan mengatasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil limbah elektronik dalam melaksanakan ketentuan mengenai kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik. Dalam hal ini, penegakan hukum administrasi sudah berjalan dengan semestinya namun belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang telah berlaku disebabkan karena pada saat menerapkan penegakan hukum administrasi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengalami beberapa kendala.

**Kendala yang Dihadapi Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Administrasi Atas Kewajiban Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Limbah Elektronik Bagi Penghasil Limbah Elektronik Di Kota Surabaya**

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada Bapak Harijadi selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di bidang Pengawasan dan Pengendalian menjelaskan bahwa pihak pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam lingkup kabupaten/kota terdapat keterbatasan jumlah tenaga pengawas. Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan rutin tersebut dilaksanakan oleh 1 pengawas dan untuk pengawas dalam pelaksanaan pengawasan karena adanya pengaduan juga dilaksanakan oleh 1 pengawas. Dalam hal ini, jumlah keterbatasan pengawas tersebut berpengaruh terhadap perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang diawasi, jadi tidak banyak perusahaan/industri maupun kegiatan usaha di Kota Surabaya yang dapat diawasi secara menyeluruh.

Kendala lain yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu di Kota Surabaya belum memiliki tempat pemilahan atau tempat pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) tersendiri. Beliau menjelaskan bahwa penghasil limbah baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut menyerahkan pengelolaan limbahnya ke tempat pengolah limbah yang terdapat dibeberapa kota lain (diluar Kota Surabaya) yang sudah memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Selama ini limbah B3 tersebut di kelola ke daerah Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan di Jawa Timur hanya Kota Mojokerto yang mempunyai tempat pengelolaan limbah B3, itupun dengan kapasitas yang kecil (Lathifiyah 2019).

Terdapat 2 kemungkinan yang terjadi, yakni penghasil limbah akan membawa limbahnya ke tempat pengolahan limbah B3 (limbah elektronik), tetapi kemungkinan terbesarnya yaitu kapasitas di tempat pengolahan limbah tersebut mengalami kelebihan muatan (*overload*). Selanjutnya kemungkinan yang kedua yakni penghasil limbah mengetahui adanya tempat pengolah limbah B3 (limbah elektronik) yang berada di luar Kota Surabaya, namun penghasil limbah tersebut tidak mengelola limbahnya dan dibuang begitu saja tanpa mengikuti dan menaati prosedur persyaratan dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik). Beliau juga menyampaikan bahwa terjadinya pelanggaran disebabkan mahalnya biaya pengiriman limbah B3 dari Kota Surabaya ke Kota Mojokerto hingga Jawa Barat dikarenakan jarak yang sangat jauh. Sehingga penghasil limbah B3 baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut sering melanggar dan tidak mengelola limbah B3-nya sesuai dengan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan.

Kendala yang dihadapi Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selanjutnya yaitu pada saat penyusunan dokumen-dokumen mengenai perizinan lingkungan yang dimana dokumen-dokumen lingkungan tersebut sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik), masih banyak perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang kurang memperhatikan dan kurang mematuhi terhadap prosedur persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sering kali penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang akan melakukan penyimpanan sementara terhadap limbah yang dihasilkannya, ditemukan bahwa terdapat perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut yang belum memiliki izin penyimpanan sementara. Seperti yang diketahui bahwa sebelum melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara, penghasil limbah B3 (limbah elektronik) diwajibkan memiliki izin terlebih dahulu, izin ini berupa izin lingkungan dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dan melampirkan persyaratan izin. Hal ini berdasarkan pada Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada saat pemeriksan ditemukan juga bahwa limbah yang dihasilkan perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut belum terdata pada dokumen-dokumen persyaratannya. Selain itu, terdapat penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang melanggar dan telah dikenai sanksi administrasi namun pelanggar tersebut tidak segera memenuhi dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan terhadap sanksi administrasi yang diberikan meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik), dan pencabutan izin pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) untuk kegiatan pengolahan limbah B3 (limbah elektronik).

Pada penegakan hukum tentunya tidak lepas faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya yang ditimbulkan terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang dapat disebutkan sebagai berikut (Soekanto 2012): a. faktor hukum itu sendiri. b. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. faktor masyarakat. e. faktor kebudayaan.

Berdasarkan (5) faktor yang memperngaruhi penegakan hukum administrasi tersebut, terdapat (3) faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum administrasi atas kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik yaitu faktor penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Penegak hukum merupakan orang yang secara langsung mengurusi dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum itu saja tetapi juga pada penjagaan kenyamanan dan kemaslahatan bersama. Penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan di masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan/skill tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat (Soekanto 2012).

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat/instansi penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas (Herlina 2017). Dalam hal ini terdapat keterbatasan jumlah tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap penghasil limbah elektronik yang akan melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas tersebut berpengaruh terhadap perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang diawasi, jadi tidak banyak penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha di Kota Surabaya yang dapat diawasi secara menyeluruh.

Hambatan lainnya yakni faktor sarana atau fasilitas, sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting bagi penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak mungkin bagi penegak hukum untuk menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual dan nyata (Soekanto 2012). Ketiadaan atau keterbatasan sarana dan fasilitas, akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih, yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal (Herlina 2017).

Penangangan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai dikarenakan di Kota Surabaya belum memiliki tempat pemilahan atau tempat pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) tersendiri. Di Jawa Timur hanya Kota Mojokerto yang mempunyai tempat pengelolaan limbah B3, itupun dengan kapasitas yang kecil. Selain dikelola di Mojokerto, penghasil limbah baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha di Kota Surabaya tersebut menyerahkan pengelolaan limbahnya ke daerah Jawa Barat. Dalam hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit disebabkan mahalnya biaya pengiriman limbah B3 dari Kota Surabaya ke Kota Mojokerto hingga Jawa Barat dikarenakan jarak yang sangat jauh serta limbahnya harus terpisah sesuai dengan jenisnya.

Faktor terakhir yang menjadi kendala yakni faktor dari masyarakat, masyarakat dalam hal ini penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang dimana dari kegiatan dan/atau usahanya berpotensi menghasilkan limbah B3 (limbah elektronik). Masyarakat berperan dalam penegakan hukum karena penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat (Soekanto 2012). Melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyrakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memunginkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik (Syahrani 2011).

Kesadaran hukum antara lain meliputi (Syahrani 2011): 1. pengetahuan tentang hukum. 2. penghayatan fungsi hukum. 3. ketaatan terhadap hukum. Hasil wawancara dengan Bapak Harijadi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada saat melakukan pengawasan seringkali menemukan kegiatan usaha yang belum memiliki izin tempat penyimpanan sementara dan ditemukan juga bahwa limbah yang dihasilkan perusahaan/industri maupun kegiatan usaha tersebut belum terdata pada dokumen-dokumen persyaratan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik. Selain itu, terdapat penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang melanggar dan telah dikenai sanksi administrasi namun pelanggar tersebut tidak segera memenuhi dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan terhadap sanksi administrasi yang diberikan. Dalam hal ini kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum atau ketentuan yang telah ditetapkan tersebut menjadi sebab masih sering terjadi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dan setelah dilakukan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018 hingga 2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi dengan mekanisme pelaksanaan secara bertahap dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga pembekuan izin. Dari jumlah kegiatan usaha yang dikenai sanksi administrasi tersebut, hanya 4 kegiatan usaha belum memenuhi sanksi administrasi sebagaimana diterima. Apabila dari jangka waktu yang diberikan belum memenuhi sanksi administrasi, maka akan diberi sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya.
2. Kendala yang dihadapi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yaitu jika dilihat dari teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu salah satunya faktor penegak hukum dalam hal ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Pada tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam lingkup kabupaten/kota yang mengalami keterbatasan jumlah yang dimana dapat berpengaruh terhadap perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang diawasi. Selain itu terdapat faktor sarana atau fasilitas, dimana tidak memadai dikarenakan di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri, Serta dari faktor masyarakat dalam hal ini penghasil limbah elektronik yakni kurangnya tingkat ketaatan untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik.

**Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, diharapkan segera mendirikan pembangunan tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri di Kota Surabaya, supaya penghasil limbah B3 (limbah elektronik) baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang akan melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) bisa mendapatkan sarana dan fasilitas yang memadai, selain itu dapat melaksanakan pengelolaan tersebut secara efektif sesuai dengan prosedur persyaratan yang berlaku, serta dapat meminimalisir biaya transportasi pengiriman limbah elektronik.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, diharapkan penegakan hukum administrasi atas kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah elektronik sebaiknya lebih optimal dilakukan. Penegakan hukum administrsi berupa upaya represif yang dilakukan dengan memberikan penindakan sanksi administrasi terhadap penghasil limbah elektronik yang melakukan pelanggaran haruslah ditindak dengan cara memberikan perhatian yang serius dan diterapkan dalam sistem penegakan hukum lingkungan, sehingga dapat mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi. Selanjutnya dalam hal keterbatasan jumlah tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sebaiknya dapat melakukan penambahan jumlah tenaga pengawas supaya lebih banyak perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kota Surabaya dapat diawasi secara merata oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
3. Bagi masyarakat khususnya bagi penghasil limbah elektronik baik dari perusahaan/industri maupun kegiatan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menghasilkan limbah B3 (limbah elektronik), diharapkan agar lebih menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pengelolaan limbah elektronik, seperti segera mengajukan dokumen persyaratan terkait perizinan lingkungan, baik izin lingkungan untuk kegiatan pengolahan limbah elektronik serta izin lingkungan untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara. Hal ini dilakukan, mengingat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 (limbah elektronik) harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amiq, Bachrul. 2013. *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Bernstad, Anna, Jes la Cour Jansen, and Henrik Aspegren. 2010. “Property-Close Source Separation of Hazardous Waste and Waste Electrical and Electronic Equipment–A Swedish Case Study.” *Waste Management* 31.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. 2019. “Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.” Retrieved July 7, 2020 (https://lh.surabaya.go.id/weblh/).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 2018. “Pengelolaan Limbah Elektronik Di Provinsi DKI Jakarta.” Retrieved January 15, 2020 (http://kopertis3.or.id/v5/wp-content/uploads/Pengelolaan-Limbah-Elektronik.pdf).

Direktorat Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3-KLHK). 2019. “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Tangerang.” Retrieved January 2, 2020 (http://pslb3.menlhk.go.id/read/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-di-kabupaten-tangerang).

Herlina, Nina. 2017. “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3(2).

Indrihastuti, Ira and Ellina S. Pandebesie. 2014. “Potensi Timbulan Limbah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Elektronik Rumah Tangga Di Wilayah Surabaya Barat.”

Jayanti, Hilda Fentika and Mohamad Mirwan. 2018. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Elektronik Di Wilayah Surabaya Utara.” *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan Vol* 8(2).

Kang, Hai-Yong and Julie M. Schoenung. 2005. “Electronic Waste Recycling: A Review of US Infrastructure and Technology Options.” *Resources, Conservation and Recycling* 45(4).

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2018. “Pengelolaan Limbah B3 Di Indonesia (E-Waste Management).” Retrieved June 19, 2020 (http://neo.kemenperin.go.id/files/materi/2.1-Pengelolaan-E-Waste-Bali-8-Januari-2018.pptx).

Lathifiyah, Khoirotul. 2019. “Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 Di Surabaya Bisa Kurangi Pelanggaran Industri.” Retrieved July 7, 2020 (https://jatimnet.com/pembangunan-pengelolaan-limbah-b3-di-surabaya-bisa-kurangi-pelanggaran-industri).

Mukti Fajar, N. D. and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

Osibanjo, Oladele dan Nnorom, Innocent Chidi. 2006. “Material Flows of Mobile Phones and Accessories in Nigeria: Environmental Implications and Sound End-of-Life Management Options.” *Environmental Impact Assessment Review* 28.

Prans, Roberto and Ellina S. Pandebesie. 2013. “Studi Pengelolaan Sampah Elektronik Dari Rumah Tangga Di Surabaya Timur.” Retrieved July 17, 2020 (http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-25737-3308100005-Presentation.pdf).

Press Reader Jawa Pos. 2018. “Surabaya Membutuhkan Pengelola Limbah Elektronik.” Retrieved January 9, 2020 (https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180129/282437054554782).

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*. Airlangga University Press.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syaprillah, Aditia. 2016. “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan.” 1(1).

Tanuwidjaja, Sri. 2018. “Modul Manajemen Pengelolaan Dan Perizinan Limbah B3.” Retrieved July 7, 2020 (https://docplayer.info/70757183-Modul-manajemen-pengelolaan-dan-perizinan-limbah-b3.html).

Thahira, Atika. 2020. “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5(2).

Wahyono, Sri. 2012. “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik Dalam Lingkup Global Dan Lokal= Electronic Waste Management Policies in the Scope of Global and Local.” *Jurnal Teknologi Lingkungan* 14(1).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintan Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).